PROCEEDING

The 2nd Annual Conference on Islamic Education Management

THE SCIENTIFIC PARADIGM OF ISLAMIC EDUCATION MANAGEMENT

MANADO, 24-26 APRIL 2019

PROCEEDING

The 2nd Annual Conference on
Islamic Education Management (ACIEM)

Tema:
The Scientific Paradigm of Islamic Education Management
Manado, 24 - 26 April 2019

PROCEEDING

The 2nd Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM)

Tema:

The Scientific Paradigm of Islamic Education Management

Manado, 24 - 26 April 2019

PROCEEDING
The 2nd Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM).
Tema:
The Scientific Paradigm of Islamic Education Management

x + 678 hlm: 21 cm x 29 cm
Cetakan 1, April 2019
Lay Out: Sufi
Desain Cover: Suhaimi ©

ISBN: 978-602-51969-8-0

Diterbitkan oleh
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Tlp. 0274 – 513056

Bekerjasama dengan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado.
Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI) Indonesia

KATA PENGANTAR

Kemapanan suatu bidang ilmu selain bergantung pada dasar teori, metodologi dan praksis yang ditetapkan dalam objek formal dan objek materialnya, juga ditentukan oleh paradigmanya. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif).

Manajemen Pendidikan Islam sebagai suatu bidang ilmu karenanya perlu memiliki paradigma keilmuan yang mapan agar eksistensinya diakui kalangan intelektual dan cendekiawan manajemen pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Spesifikasi bidang ilmu Manajemen Pendidikan Islam sebagai cabang dari ilmu pendidikan Islam (Islamic Education), perlu lebih diperjelas agar secara fungsional ia dapat memberi corak baru dan berkontribusi nyata dalam mengembangkan ilmu manajemen pendidikan.

Bidang ilmu Manajemen Pendidikan Islam juga harus mampu menyesuaikan dirinya dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, trend peradaban, dan kebutuhan masyarakat. Revolusi Industri 4.0, misalnya, sebagai perkembangan peradaban modern telah dirasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial Intelligence).

Fenomena disrupsi yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi, akan membawa kita pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. Termasuk dalam hal ini adalah tata kelola kelembagaan pendidikan Islam. Pada konteks inilah paradigma keilmuan Manajemen Pendidikan Islam relevan untuk dikaji dan diskusikan melalui pendekatan riset ilmiah (scientific research).

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI) mengadakan kegiatan The 2nd Annual Conference on Islamic Education Management (ACIEM) bertema “The Scientific Paradigm of Islamic Education Management” dengan mengkaji berbagai isu-isu mutakhir perkembangan paradigma keilmuan Manajemen Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 24 April 2019
Editor in Chief

DAFTAR ISI

Manajemen Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi Islam Berbasis Karakter Profetik

Siti Khodijah
STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta
e-Mail: *khadijah.khan7@gmail.com*

Abstract
Quality assurance is a must for every institution in order to guarantee the quality/ww of higher education. Quality assurance activities cannot be separated from the implementation of management functions to achieve its objectives. Management of quality assurance in Islamic higer education is generally applied with a scientific approach, not yet on the conception of religion, whereas in reality Islamic higher education carries religious messages in its implementation and management policies, then, the first, concept of Islamic value can use as base for quality assurance, second, the concept applied in the steps of PPEPP. This literature study shows that the prophetic characteristic can be used as a comprehensive approach when applied in quality assurance management of Islamic higher education.

Keywords: *SPMI, Quality Assurance, PPEPP*

Abstrak
Penjaminan mutu merupakan keharusan bagi setiap perguruan tinggi dalam rangka menjamin kebermutuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kegiatan penjaminan mutu tidak terlepas dari implementasi fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuannya. Manajemen penjaminan mutu di perguruan tinggi Islam pada umumnya diterapkan dengan pendekatan sains, belum pada pendekatan konsepsi agama padahal pada kenyataannya pendidikan tinggi Islam membawa pesan-pesan religius dalam kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaannya, maka pertama, konsep ajaran Islam yang tepat untuk dijadikan basis dalam penjaminan mutu perguruan tinggi Islam kedua, penerapan konsep tersebut dalam langkah-langkah PPEPP. Kajian literature ini menunjukkan bahwa sifat wajib Rasul dapat dijadikan pendekatan yang komprehensif ketika diterapkan dalam manajemen penjaminan mutu perguruan tinggi Islam.

Kata Kunci: *SPMI, Penjaminan Mutu, PPEPP*

Pendahuluan

Secara hirarkis Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah pendidikan menengah yang menyelenggarakan program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, hingga spesialis. Pendidikan tinggi mengemban amanat untuk menjalankan kewajiban yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi dilaksanakan atas asas kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan,

dan keterjangkauan. Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.[1]

Pendidikan tinggi bertujuan mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[2]

Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan Negara.[3] Tridharma Perguruan tinggi merupakan amanat Negara kepada penyelenggara pendidikan tinggi melakukan upaya-upaya optimalisasi peran pendidikan tinggi. Perguruan tinggi mendukung Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa.

Menurut Nizam dan Bassaruddin, secara umum tantangan pengembangan pendidikan tinggi di tingkat nasional antara lain: (1) Indonesia menuju generasi emas, (2) dinamika reformasi dan transformasi menuju masyarakat demokratis dan penegakan hukum, (3) pergeseran masyarakat agraris ke industry konsekuensi urbanisasi, (4) peluang kerja dan angka pengangguran yang tidak sebanding, (5) rendahnya output Tridharma dan kesenjangan mutu, (6) ekspansi sistem pendidikan tinggi. Sedangkan internal perguruan tinggi mengalami kompleksitas dalam tata kelola kampus, budaya perguruan tinggi, tipe kepemimpinan. Mutu pendidikan tinggi sangat penting dalam mendorong mutu akademik.[4]

Manajemen mutu idealnya memiliki *ruh* dalam menjalankan penjaminan mutu sehingga memiliki akuntabilitas publik. Dalam hal ini tentunya perguruan

---

[1] Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

[2] *Ibid*.

[3] *Ibid*.

[4] Nizam dan T. Bassaruddin, “Manajemen Pendidikan Tinggi”, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia, available at http://luk.staff.ugm.ac.id/

tinggi Islam menjadikan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam al Quran dan Hadis sebagai *ruh* dalam penegakan prinsip *good university governance*.

Konsep Mutu dalam Pendidikan

Pengertian mutu memiliki variasi definisi di kalangan ahli manajemen. Menurut Deming dalam Koeswara dan Triatna mutu pendidikan merupakan konsep yang bermula dari *Total Quality Management* (TQM). TQM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920-an oleh Edward Deming di Jepang. Konsep TQM berkembang dari pemikiran untuk mewujudkan produk yang bermutu hingga kemudian meliputi semua aspek organisasi. Perkembangan mutu dapat ditelusuri dari konsep *inspection*, *quality control and statistical theory*, *quality in Japan* hingga *total quality*.[5]

Kerangka *inspection* dibangun oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1911 melalui publikasinya yang berjudul *The Principle of Scientific Management*. *Inspection* memuat konsep pendayagunaan orang secara efektif dalam suatu organisasi. Taylor mendefinisikan tugas-tugas dalam suatu standar. Salah satu tugas inspeksi bertujuan (1) menyediakan jaminan bahwa tidak ada kegagalan produk baik pada pabrik maupun workshop, (2) memfokuskan pada produk dan mendeteksi masalah-masalah dalam produk, (3) melaksanakan pengetesan untuk setiap item untuk menjamin bahwa produk sesuai dengan spesifikasinya, (4) menganalisis proses produksi akhir dan mendukung pelatihan khusus inspektur. Pengaturan tugas-tugas ini pada akhirnya memunculkan organisasi-organisasi yang menangani masing-masing tujuan tersebut.[6]

Quality control and statistical theory pertama kali diperkenalkan oleh Walter A. Shewhart pada tahun 1920-an. Konsep manajemen mutu ini mengembangkan aplikasi metode statistik untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah-masalah selama proses produksi untuk mencegah kegagalan produk. Eliminasi variasi dalam proses akan menghasilkan standard an produk akhir yang baik. Sistem kerja kontrol mutu metode statistik ini (1) memfokuskan pada pendeteksian dan control mutu produk, (2) melibatkan uji sample statistik guna menyimpulkan kesamaan untuk semua produk, (3) menyadari pentingnya pelatihan personalia bagian produksi dan kontrol mutu.[7]

Quality in Japan menggambarkan inovasi manajemen di Jepang untuk meningkatkan mutu produk-produk Jepang. Konsep ini diinisiasi oleh Deming, Juran dan Feigenbaum. Ketika ide ini dikembangkan tidak hanya memberikan efek seputar peningkatan mutu produk tetapi menghasilkan faktor lain pendukung mutu, yaitu pegawai. Pegawai dalam *Quality in Japan* diposisikan sebagai pihak-

[5] Deni Koswara dan Cepi Triatna, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 283

[6] *Ibid.*, hlm. 290.

[7] *Ibid.*, hlm. 291.

pihak yang perlu dilibatkan dan didengar agar menjadi bagian dari mutu (*Circle quality*).[8]

Kesuksesan *Quality in Japan* mengenai isu-isu kepegawaian perusahaan-perusahaan di Barat mulai mengenalkan inisiatif mutu menurut versi mereka. Salah satu gagasan ini kemudian dikenal dengan *Total Quality Management* (TQM). Istilah *Total Quality* dimunculkan pertama kali oleh Arman Val Feigenbeum dalam konferensi internasional mengenai *Quality in Japan*. TQM merupakan pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.[9] TQM secara spesifik mendefinisikan fokus pelanggan, keterlibatan semua sumber daya manusia, perbaikan berkelanjutan, dan integrasi manajemen mutu ke dalam organisasi.

Mutu dengan pendekatan TQM berorientasi memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Peter dalam Sallis berpendapat bahwa mutu yang didefinisikan oleh pelanggan jauh lebih penting dibandingkan harga dalam menentukan permintaan jasa dan barang. Mendefinisikan mutu dengan TQM perlu dipahami mengenai kontrol mutu, penjaminan mutu, dan mutu terpadu. Kontrol mutu melibatkan deteksi dan eliminasi komponen-komponen atau produk gagal yang tidak sesuai dengan standar. Kegiatan ini dilakukan pasca produksi dengan menolak item-item yang cacat. Berbeda dengan kontrol mutu, Jaminan mutu dilakukan sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Menurut Cosby dalam Salli jaminan mutu adalah desain mutu untuk menciptakan produk tanpa cacat (*zero defect*). Penekanan ini bertujuan untuk mencegah terjadi kesalahan ataupun kecacatan sejak awal proses produksi. Jaminan mutu memerlukan desain sedemikian rupa untuk menjamin bahwa proses produksi memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam kehidupan sehari-hari mutu seringkali disinonimkan dengan kualitas. Meskipun kualitas dapat dirinci namun mendefinisikan terkadang tidak mudah. Kualitas seiring dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Namun demikian aspek penting dalam kualitas adalah sebuah produk memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Meskipun aspek keluaran produk adalah aspek penting namun bukan satu-satunya parameter kualitas. Stephen Uselac dalam Tjiptono dan Diana menegaskan bahwa kualitas juga meliputi proses, lingkungan, dan manusia.[10] Garvin melihat kualitas dari perbagai perspektif atau pendekatan, yaitu *transcendental approach*, yaitu kualitas dapat dirasakan atau diketahui tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan. *Product based approach* menganggap kualitas sebagai sebuah karakteristik yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan jumlah

---

[8] *Ibid.*, hlm. 291-292.

[9] Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 4

[10] *Ibid*, hlm. 2-3

beberapa unsur yang dimiliki product. *User based approach* didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada perspektif individu dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang. *Manufacturing based approach* memperhatikan praktek-praktek perekayasaan dan manufacturing, mendefinisikan kualitas sebagai sama dengan persyaratannya. *Value based approach* memandang kualitas dari segi nilai dan harga dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga.[11]

Mendapatkan kualitas output tidak terlepas dari budaya kualitas sebagai penunjang daya saing. Goetsch dan Davis dalam Tjiptono dan Diana memaknai budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan kualitas secara terus menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas.

Hal yang fundamental dari pemahaman mengenai teori mutu adalah pemahaman mengenai produk dan pelanggan dalam konteks pendidikan. Menurut Sallis, mendefinisikan ketidaktepatan penggunaan istilah tersebut dapat ditinjau mengenai perbedaan karakteristik jasa dan produk karena keduanya berkaitan dengan penerima jasa/layanan dan produk. Perbedaan karakteristik tersebut juga akan memperlihatkan bagaimana penyelenggaraan pendidikan dipandang, sebagai industri atau sebagai proses produksi.[12] Secara praksis perbedaan karakteristik dan sudut pandang yang muncul hal tersebut memiliki kesesuaian fakta dengan pendidikan maupun mutu pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan secara institusional menginginkan adanya pelayanan terhadap dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Internal pendidikan berupa sivitas akademika membutuhkan tata kelola berkualitas sehingga memperlancar pelaksanaan program-program sekolah/perguruan tinggi. Layanan tata kelola yang baik akan berpengaruh signifikan terhadap kecepatan ketercapaian tujuan pendidikan. Ketercapaian tujuan pendidikan sebagai hasil akhir proses pendidikan memberikan dampak pada pihak-pihak eksternal, seperti orang tua, negara, pengguna lulusan, dan alumni. Dapat dikatakan dalam hal ini tujuan pendidikan adalah klimaks dari jasa/layanan yang termanifestasi dalam bentuk produk berkualitas atau unggulan. Ketika pihak-pihak eksternal tersebut terpuaskan oleh produk berkualitas maka preferensi user/stakeholder memberikan penilaian terhadap mutu suatu institusi pendidikan. Maka dapat dikatakan secara teoritis pendekatan mutu dari sudut pandang ekonomi memiliki relevansi dengan mutu pendidikan.

Mutu pendidikan tinggi menurut UU adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi dan

---

[11] *Ibid.*, hlm. 24-26

[12] Edward Sallis, *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*, penterjemah: Ahmad Riyadi dan Fachrurrozi, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm.62-69

standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.[13] Meskipun pada pelaksanaan penjaminan mutu diberikan kewenangan untuk mengikuti standar mutu skala internasional namun UU mensyaratkan untuk memenuhi standar mutu nasional pendidikan tinggi (SN Dikti).

Penjaminan Mutu pendidikan tinggi

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dinyatakana dalam pasal 50 ayat (6) UU sistem pendidikan nasional. Otonomi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Sejak saat tersebut kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah PTS, model statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh pemerintah dihapuskan secara bertahap. Implikasi otonomi ini adalah perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan penjaminan mutu pendidikannya secara mandiri. Kegamangan mengenai penjaminan mutu tersebut diinisiasi dengan diseminasi buku pedoman penjaminan mutu agar setiap perguruan tinggi menyadari bahwa tanggung jawab mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi utama di tangan perguruan tinggi sendiri.

Diseminasi tersebut juga bertujuan memberi inspirasi pada setiap perguruan tinggi tentang apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Setelah lima tahun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi Ditjen pendidikan tinggi melakukan evaluasi yang mana hasil merekomendasikan mendesain ulang penjaminan mutu pendidikan tinggi dengan mengintegrasikan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti) yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan Pangkalan data Pendidikan tinggi (PD Dikti baik pada tingkat perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti.[14]

Sistem Penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi Indonesia. Budaya mutu adalah pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan standar pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholder) di perguruan tinggi. SPM Dikti menetapkan tiga standar pendidikan tinggi yaitu mencakup (1) standar nasional pendidikan pendidikan tinggi (SN Dikti), (2) standar nasional penelitian, (3) standar nasional pengabdian kepada

[13] Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi

[14] Direktorat Penjaminan Mutu, *Pedoman SPMI Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh*, (Jakarta: Kemenristekdikti, 2018), hlm. 2.

masyarakat. Masing-masing standar terdiri dari 8 substandar yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi. Namun demikian, perguruan tinggi diberikan kewenangan dalam dalam mengembangkan ketiga standar tersebut sesuai dengan karakteristik dan keunikannya sehingga dapat melampaui standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan SPMI berpegang pada prinsip otonom, terstandar, akurasi, berencana dan berkelanjutan, terdokumentasi. *Otonom* dalam artian, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras unit pengelola program studi (jurusan, departemen, sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas). *Terstandar* yaitu SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. *Akurasi* adalah SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. Berencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP (Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) Standar Dikti yang membentuk suatu siklus. *Terdokumentasi* adalah Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.[15] Dokumentasi SPMI terdiri dari dokumen kebijakan mutu, standar mutu, manual dan prosedur, dan formulir mutu. Dokumen kebijakan SPMI memuat tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga tercipta budaya mutu. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu memuat kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi untuk mewujudkan visi misi perguruan tinggi. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari manual mutu atau prosedur mutu dan standar mutu.[16]

Nilai-nilai profetik sebagai basis penjaminan mutu pendidikan

Secara leksikal kata profetik (Inggris: *phrophetic*) mempunyai makna kenabian atau karakteristik yang ada dalam diri seorang nabi. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya, sedangkan rasul adalah hamba Allah yang diangkat sebagai nabi dan mendapatkan tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sebagaimana seorang Nabi begitu pula seorang rasul mereka dibekali Allah dengan keistimewaan (mu'jizat) dan kesempurnaan sifat sebagai penguat

[15] *Ibid.,* hlm. 29.
[16] *Ibid.*, hlm. 31-39.

risalah yang ia bawa. Sifat nabi mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual individual. Nabi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan membangun kualitas peradaban manusia.

Dalam syarah *'Aqidatul Awam* disebutkan bahwa para rasul memiliki sifat para nabi yaitu *fathanah*, *shiddiq*, *tabligh*, dan *amanah*. Keempat sifat tersebut disebut dengan sifat wajib rasul.[17] Konsep sifat wajib, mustahil, dan jaiz berangkat dari kenyataan bahwa untuk membuktikan eksistensi mayoritas sifat tersebut meskipun terdapat dalil *naqli* yaitu al Quran dan Hadis sebagai sumber akidah namun tetap membutuhkan penalaran akal sehat yang dalam konteks ini disebut dengan dalil *'aqli* yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Adapun *wajib 'aqli* adalah segala hal yang menurut akal pasti adanya atau tidak dapat diterima ketiadaannya. Sedangkan *mustahil 'aqli* adalah segala hal yang menurut akal pasti tidak ada atau tidak diterima adanya. Sedangkan *jaiz 'aqli* adalah segala hal yang menurut akal bisa saja ada maupun tidak atau diterima ada maupun ketiadaannya.[18]

Empat sifat wajib rasul yaitu *Siddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, *Fathonah* telah dilegitimasi oleh Allah dalam surah al Ahzab:21, *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.* Secara historis keempat sifat tersebut merupakan personality yang membawa keselamatan dan kebesaran dakwah Nabi s.a.w.

Siddiq berarti jujur. Setiap rasul pasti jujur dalam pengakuan atas kerasulannya, dan apa yang disampaikan pasti benar adanya. Sifat *Shiddiq* ini telah dilegitimasi oleh Allah dalam surah an-Najm: 1-5. Pada ayat pertama Allah melegitimasi sifat kerasulan nabi Muhammad dengan *qasam* (sumpah). *Qasam* tersebut untuk meyakinkan kepada manusia bahwa nabi Muhammad adalah orang yang tidak dalam kondisi tersesat atau keliru tetapi perbuatan dakwah yang beliau jalankan adalah benar. Benar atas perintah Allah dan hanya membawa kebenaran. Dakwah islam yang dilakukan nabi dipandu oleh Allah sehingga terbebas dari sifat manusiawi melibatkan nafsu dalam perbuatannya. Semua hal yang disampaikan hanya dan hanya bersumber dari wahyu dari Allah semata yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Dalam qs. Yusuf:46, lafaz *as shiddiiq* diartikan sebagai orang yang sangat dipercaya. *as shiddiiq* dalam kalimat ini menunjuk pada *laqob* seorang mantan narapidana yang telah membuktikan kebenaran ucapan nabi Yusuf mengenai *ta'bir* mimpinya. Dalam qs. Maryam:54 Allah memperkenalkan karakter nabi Ismail sebagai sosok yang benar janjinya. Dengan demikian *shiddiq* menunjuk pada kualitas kepercayaan dan prinsip moral yang kuat sebagai ciri kepribadian

---

[17] Muhyiddin Abdusshomad, *Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah: Terjemah & Syarh 'Aqidah al 'Awam*, (Surabaya: Khalista, 2009), hlm. 27.

[18] Khoiron, "Dalil dan Penjelasan tentang 20 Sifat Wajib Bagi Allah", *NU Online*, diakses dari http://www.nu.or.id/post/read/87676/dalil-dan-penjelasan-tentang-20-sifat-wajib-bagi-allah, posted 24 Maret 2018, 19:15.

yang bulat dan utuh. Dari aspek bahasa *Shiddiq* dapat disinonimkan dengan kata integritas.

Istilah *Integritas* dalam kehidupan sehari-hari dipandang sebagai standar moralitas etika seseorang. Berkaitan dengan kejujuran dan kebenaran dari perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, menjadi penentu keluhuran martabat seseorang dalam kehidupannya. Jika dikaitkan dengan suatu obyek maka integritas bersifat menyeluruh dan utuh atau menunjukkan kemurnian sesuatu. Integritas juga merupakan atribut dari beberapa aspek kehidupan seseorang, seperti professional, intelektual maupun integritas artistik. Karena tersebut integritas diyakini akan membawa pada tatanan sosial yang baik dan beradab. Secara filosofis integritas merupakan sebuah karakter yang bersifat umum, setidaknya melibatkan dua pemahaman mendasar, *pertama*, secara formal integritas berhubungan dengan kedirian seseorang, atau aspek-aspek yang ada dalam diri seseorang, *kedua*, integritas berhubungan dengan tindakan moral. *Stanford Encyclopedia of Philosophy* menyebutkan integritas dapat dicirikan (1) *as self integration*. Integritas merupakan perpaduan personaliti seseorang dalam sebuah harmoni yang utuh dan menyeluruh. (2) *Identity view*, identitas diri seseorang ditunjukkan melalui keteguhan dalam memegang komitmen. Komitmen merupakan sebuah perlindungan terhadap perbedaan tujuan, janji, prinsip, hubungan saling percaya, dan harapan. (3) *self-constitution*, merupakan bagian dari tantangan yang harus dihadapi oleh dalam *self integration* dan *identity vew*. Tantangan tersebut bukan suatu penolakan tegas tetapi sebuah pertahanan dari *self-constitution* yang pada akhirnya harus diperhitungkan. (4) *as standing for something*. Seseorang yang berintegritas tidak hanya bertindak karena adanya suatu dukungan, tetapi mereka memberikan dukungan terbaik. Mereka menghargai hal-hal yang dianut dan dianggap bernilai oleh suatu masyarakat. (5) *as moral purpose*. Seseorang yang berintegritas harus menjunjung kebenaran, memiliki *moral agreement*, dan menunjukkan sikap moral yang jelas. (6) *as a virtue*, berintegritas dapat diartikan sebagai tidak bertentangan dengan batas norma-norma yang berlaku. Kemunafikan, fanatisme dan hal yang sejenis merupakan kemunduran integritas.[19]

Amanah dalam makna leksikal berarti dapat dipercaya. Secara historis nabi diberikan gelar al Amin oleh masyarakat Makkah sebagai pujiannya atas kemuliaan perilakunya. Lafaz *Amin* dalam al Quran juga digunakan '*Ifrit* untuk mendapatkan kepercayaan nabi Sulaiman ketika membangun diplomasi dengan ratu Bilqis (qs. An Naml:39). Pernyataan *Rasulun Amin* juga digunakan oleh Nabi Musa dalam membangun diplomasi dengan Firaun (qs. Ad Dukhan:18). Dengan kata lain, Amanah merupakan sifat yang krusial mengantarkan keberhasilan dan kemuliaan seseorang. Amanah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa ilmiah popular sinonim dengan kata kredibel. Zuydam menyebutkan seorang pemimpin disebut

---

[19] Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Integrity", available online at http://plato.stanford.edu/entries/integrity diakses pada 26/03/2019 pukul 21:14 wib

kredibel apabila ia mempunyai kompetensi, dapat dipercaya, dan memiliki perhatian pada publik.[20] Menurut O'Keefe kredibilitas dapat juga diartikan sebagai pendapat seseorang mengenai kemampuan komunikator membuat percaya; sesuatu yang melekat dalam personality seseorang; atribut yang disematkan public pada seseorang.[21] Dengan demikian dapat dikatakan, kredibilitas seseorang didasarkan pada perpaduan karakteristik yang ia perlihatkan dalam kehidupan personal maupun professional yang membentuk kepercayaan dalam setiap performanya.

Tabligh berarti menyampaikan wahyu. Seorang nabi yang telah diangkat menjadi rasul diperintahkan dan berkewajiban menyampaian wahyu kepada umatnya agar beriman kepada Allah tanpa ada satu hal pun yang terlewat ataupun disembunyikan. Dalam qs. Al A'raf: 62 dijelaskan risalah kenabian dijalankan melalui aktifitas dakwah berupa menjelaskan amanat-amanat Tuhan (dhi. Menyampaikan ajaran-ajaran agama) dan memberikan nasehat. Dengan demikian aktifitas dakwah tersebut membutuhkan kemampuan komunikasi sehingga risalah kenabian sampai kepada umat dengan jelas, cepat dimengerti, dan mendapatkan penerimaan. Komunikatif (*ready and willing to talk and give information*) adalah sifat yang wajib dimiliki seorang rasul. Mereka memiliki kesiapan dan kemauan untuk menyampaikan dan memberikan informasi ajaran agama kepada umat. Kondisi manusia sebagai makhluk yang pandai berbantah (qs. Al Akhfi:54) mengharuskan rasul memiliki sifat *tabligh* sehingga interaksi dalam dakwah memberikan pengaruh kepada masing-masing orang. Namun, komunikatif dalam konteks sifat rasul tidak hanya menunjuk pada *skill* tetapi juga menunjuk pada akhlaq berkomunikasi sebagaimana teguran Allah kepada nabi Muhammad dalam qs. Abasa: 1-11. Komunikatif menunjuk pada karakteristik yang lahir dalam *skill* membangun interaksi secara verbal maupun nonverbal dengan lawan bicaranya. Seseorang yang komunikatif dapat melakukan transformasi simbol-simbol bahasa dalam dua bentuk, *pertama*, mengubah gesture ke dalam simbol-simbol bermakna, *kedua*, perilaku mengubah relasi interpersonal antara pembicara dan lawan bicaranya dengan hubungan sebab akibat antara stimulus-respon-stimulus.[22]

Fathonah berarti cerdas. Seorang rasul pasti orang yang cerdas agar mampu membangun strategi dakwah mengahadapi para pembangkang yang menolak ajaran islam. Cerdas sebagai kata sifat menunjukkan ketajaman pikiran. Menurut Whiterington kecerdasan adalah respons yang dilakukan dengan cepat, mudah

---

[20] Sabine Van Zuydam, "Credibility as a Source of Political Capital: Exploring Political Leaders' Performance from a Credibility Perspective", Zuydam, Sabine Van. "Credibility as a Source of Political Capital: Exploring Political Leaders' Performance from a Credibility Perspective", paper prepared for the ECPR Joint session 2014, workshop 15: Political Capital and the Dynamic of Leadership: Exploring the Leadership Capital Index. Available pdf at <http://ecpr.eu/filestore/paperproposal/71691ba3-7f4b-4f4a-ae59-3d7551645733.pdf/>

[21] *Ibid*.

[22] Jurgen Habermas, *The Theory of Communicative Action Volume 2* Translation of Theories des kommunikativen Handelns, (Massachusetts: Beacon Press, 1987), hlm. 9.

serta tepat, sehingga disebut dengan inteligensi yang mana merupakan substansi dari sebuah tindakan atau sebuah respon.[23] Sternberg menyebut bahwa seseorang dikatakan cerdas apabila seseorang mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan aspek *analytical*, *creative*, dan *practical* yang mereka miliki tersebut secara efektif.[24] Sifat *fathonah* rasul berbeda dengan kecerdasan yang diberikan Allah kepada manusia biasa. Allah memberikan kecerdasan kepada para rasul melalui Ilham. Setiap pengetahuan yang diterima para rasul disempurnakan dengan hikmah. Hikmah merupakan kesempurnaan ilmu dan ketelitian amal perbuatan kenabian (qs. Al Baqarah:269 dan qs. Shaad:20). Qs. Al Baqarah: 31-32 menuturkan bagaimana Allah memberikan kecerdasan kepada nabi Adam a.s menerima pengetahuan-pengetahuan sekaligus hikmah dari Allah jauh sebelum manusia mengetahui hal apapun. Allah juga mempersiapkan Nabi Musa a.s untuk menjadi rasul dengan diberikan ilham dan hikmah kenabian (qs. An Nahl:125).

Membawa konsepsi agama dalam aktivitas manajemen penjaminan mutu di perguruan tinggi Islam dipandang perlu dilakukan. Aktifitas manajemen pada dasarnya telah diajarkan Allah sejak Allah hendak menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Allah menyampaikan kehendaknya kepada para Malaikat dalam perspektif manajemen dapat dikatakan sebagai aktifitas *planning* hingga membuat larangan memakan buah *Khuldi* ketika nabi Adam tinggal di surga juga dapat dikatakan sebagai kegiatan *controlling*, begitu seterusnya berlaku hingga saat ini. Islam mengajarkan bagaimana sesuatu dikerjakan dengan perencanaan-perencanaan, tahapan-tahapan, tindakan-tindakan, dan pengawasan-pengawasan karena aktifitas manusia tanpa manajemen yang baik hanya akan mengantarkan pada kehancuran. Manajemen dalam pandangan Islam ibarat sebuah siklus yang berotasi dan sistemik. Manajemen akan selalu ada dan harus ada selama suatu aktifitas itu ada. Komponen-komponen manajemen semestinya berjalan dengan baik sehingga sampai pada tujuan atau keinginan.

Membangun mutu pendidikan tinggi tentunya bukan hal mudah. Dibutuhkan proses yang cukup panjang dan prosedural sehingga mutu dapat tercapai. Namun panjangnya proses dan peliknya prosedur akan menjadi hal yang ringan ketika dijalankan dengan komitmen kuat menjalankan prinsip-prinsip Islam. Menurut Faisal dalam Nata menyebutkan pendidikan Islam seharusnya memiliki orientasi menghasilkan sumber daya yang memiliki bekal mengolah, menyesuaikan dan mengembangkan segala hal yang diterima melalui arus informasi global, yakni manusia yang kreatif dan produktif.[25]

Menjalankan penjaminan mutu melalui PPEPP harus dibangun oleh pribadi yang berintegritas, kredibel, komunikatif, dan smart. Setiap langkah dalam siklus

---

[23] H. Carl Whiterington, *Psikologi Pendidikan*, penterjemah: M. Buchori, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 197-199

[24] Robert J. Sternberg, *A Triarchic Approach to Giftedness*, (New Heaven Connectitut: Yale University, 1995), hlm. 4.

[25] Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 79

PPEPP memiliki prosedur dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkatkan mutu.[26] Penetapan standar mencakup sesuatu yang dicitakan untuk dicapai, suatu tolak ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu. Banyak langkah yang harus ditempuh dalam penetapan standar seperti mempelajari bahan, melakukan *benchmarking*, komunikasi yang melibatkan internal maupun eksternal pemangku kepentingan, dan lain-lain. Tahap ini memerlukan langkah-langkah cerdas dan komunikasi yang baik dengan semua pihak agar berjalan efektif. Integritas pihak penjaminan mutu internal sangat diperlukan dalam proses penetapan standar sehingga standar yang ditetapkan tidak berpihak dan memiliki akuntabilitas publik. Konsekuensi dari karakteristik profetik yang tidak terpenuhi dalam penetapan standar adalah dimungkinkan perencanaan SPMI tidak memenuhi kriteria karena memiliki hasil analisis yang lemah. Komunikasi yang tidak berjalan dua arah antara pihak internal maupun eksternal dapat menghambat penetapan standar yang ideal. Integritas pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar akan mempengaruhi obyektifitas perumusan standar sehingga tidak keluar dari visi misi dan tujuan perguruan tinggi.

Langkah selanjutnya setelah penetapan standar adalah pelaksanaan. Banyak langkah yang harus dilakukan seperti persiapan teknis maupun administratif, sosialisasi, penyiapan dokumen pelaksanaan, hingga pada tahap pelaksanaan. Peran pimpinan dalam mendeklarasikan pemberlakuan standar kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal sangat besar mengingat sosialisasi harus dilakukan secara periodik dan berkelanjutan agar standar yang telah ditetapkan dikenal, dipahami, dihayati oleh semua pihak yang akan melaksanakan standar.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu memerlukan karakter organisasi yang memilki *self-constitution* kuat sehingga komunikasi antarsubsistem berlangsung lancar karena tumbuh rasa saling mempercayai. Integritas yang rendah maupun komunikasi yang berlangsung satu arah memungkinkan terkuburnya informasi apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan isi standar. Fungsi *organizing* memelukan adanya karakterisasi integritas, kredibilitas, komunikasi aktif sehingga langkah *actuating* dalam penjaminan mutu dapat mencapai maupun melebihi SN Dikti.

Penerapan standar juga memungkinkan adanya temuan-temuan baru mengingat penerapan standar berlangsung sistemik dan juga memiliki kekhasan sesuai dengan karakter masing-masing standar pada masing-masing program studi sehingga perlu adanya tindakan-tindakan evaluatif untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan ataupun ketidaksesuaian pelaksanaan standar. Tindakan evaluasi bertujuan utnuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi dimaksudkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Evaluasi juga dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan atau perbaikan penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan isi standar yang telah ditetapkan SPMI. Tindakan

[26] Direktorat, *Pedoman*..., hlm. 40.

perbaikan diberlakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau terjadinya penyimpangan, sedangkan tindakan pencegahan bertujuan menghilangkan penyebab potensial ketidaksesuaian atau situasi yang tidak diinginkan lainnya. Tindakan perbaikan memerlukan kejelian dalam mengidentifikasi akar penyebab penyimpangan atau ketidaksesuain, juga kejelian menganalisis efek maupun implikasi yang ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan sehingga tidak berlangsung sistemik. Tindakan pencegahan memerlukan komitmen untuk proaktif mengidentifikasi potensi penyimpangan/ketidaksesuaian, juga kecerdasan dalam mengembangkan instruksi kerja, prosedur, maupun peningkatan sumber daya-sumber daya pelaksana isi standar SPMI. Monitoring dan evaluasi yang *fathonah*, *amanah*, serta *shiddiq* akan memudahkan pengendalian dan menemukan ruang peningkatan yang berkelanjutan dan akuntabel. Hal ini mengingat bahwa pihak-pihak evaluator harus memiliki independensi, obyektifitas, perencanaan secara sistemik, dan mengacu pada bukti.

Pengendalian pelaksanaan standar Dikti bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dalam pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengendalian juga bertujuan memastikan bahwa sumber daya perguruan tinggi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai visi misi dan tujuan perguruan tinggi. Bentuk pengendalian dalam penjaminan mutu antara lain upaya mempertahankan pencapaian, mempertahankan pelampauan, tindakan korektif apabila terjadi perlambatan dalam pencapaian standar maupun ketika pelaksanaan standar terjadi penyimpangan. Peran kepemimpina perguruan tinggi maupun kepala program studi sangat utama dalam kegiatan pengendalian. Pengendalian mutu yang akuntabel dapat dilakukan melalui prosedur mutu maupun formulir mutu yang detail untuk mengukur pencapaian maupun pelampauan standar. Kedua dokumen tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mengedepankan nilai-nilai kejujuran pelaksanaan. Prosedur mutu maupun formulir mutu juga memiliki alur maupun struktur yang komunikatif sehingga memudahkan *audience* dalam pelaksanaan, evaluasi, maupun mengendalikan pencapaian ataupun pelampauan standar. Namun begitu pengendalian harus dilakukan oleh subyek-subyek yang kompeten dan kredibel sehingga kegiatan mempertahankan dan korektif dapat dijalankan dengan tepat.

Bagian akhir dan tahap PPEPP adalah peningkatan mutu pendidikan yang mana sejatinya dimulai dari penetapan kebijakan mutu perguruan tinggi. peningkatan mutu mencakup isi dan luas lingkup standar mutu yang didorong oleh keharusan untuk peningkatan mutu berkelanjutan (*kaizen*) untuk mencapai visi perguruan tinggi, perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik. Upaya-upaya peningkatan mutu idealnya berakar dari pemikiran yang cerdas dan pribadi yang berintegritas, melahirkan inovasi-inovasi yang unggul sehingga *kaizen* mengarah pada institusi Islam unggul dan terdepan.

Menjiwai karakter profetik sehingga menjadi basis sistem penjaminan mutu perlu dilakukan penalaran mengenai nilai-nilai profetik dalam sifat wajib rasul. Menurut Kuntowijoyo nalar profetik memiliki tiga pilar, yaitu: *al-amr bi al-ma'rûf* (humanisasi) mengandung pengertian kolektivitas dalam memanusiakan manusia, *al-nahy 'an al-munkar* (liberasi) mengandung pengertian pembebasan dan *tu'minûna bi Allâh* (transendensi), dimensi keimanan manusia.[27] Dalam konteks penjaminan mutu transendensi, humanisasi, dan liberasi pada hakikatnya adalah *ruh* dari pendidikan tinggi Islam. Manusia sebagai subyek sekaligus objek pendidikan harus dimuliakan atas eksistensinya. Pendidikan Islam memiliki jauh ke depan sebagaimana dalam qs. Al Baqarah:201, yakni demi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Standardisasi dalam penjaminan mutu bukan dimaksudkan membelenggu potensi namun dalam rangka menemukan ruang peningkatan kualitas sumber daya manusia. *Ma'ruf* dapat diartikan bahwa penjaminan mutu merupakan sistem manajemen yang mengantarkan subyek dan obyek pendidikan tinggi demi kebaikan, mengarah menjadi manusia yang baik menuju pada yang Maha Baik sehingga terhindar dan terbebas dari kemungkaran atau hal-hal yang menyimpang. Nilai-nilai transendental akan melekat dalam humanisasi dan liberasi penjaminan mutu apabila menjadikan karakter profetik sebagai basis penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan penjaminan mutu sehingga sumber daya manusia pendidikan Islam memiliki kualifikasi '*abdullah* dan *khalifatullah*.

Simpulan

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Tingkat kesesuaian tersebut diselenggarakan melalui kegiatan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti). Penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Kegiatan PPEPP di perguruan tinggi Islam idealnya dibangun dengan konsepsi agama Islam, dalam hal ini adalah sifat wajib rasul, dengan argumentasi bahwa secara historis manajemen dakwah Islam era rasulullah dijalankan dengan kesempurnaan sifat wajib rasul *shidiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*. Oleh karena tersebut idealnya kegiatan penjaminan mutu dilandasi oleh karakter profetik dalam langkah-langkahnya. Karakterisasi karakter maupun internalisasi nilai-nilai profetik dalam manajemen penjaminan mutu pendidikan Islam tentunya bukan hal yang mudah, akan tetapi menjadi keniscayaan untuk diterapkan sehingga pendidikan tinggi Islam meningkatkan kepercayaan publik karena mampu hadir dan berkontribusi dalam perkembangan peradaban.

---

[27]Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Jakarta: Teraju, 2005), 103-104

Daftar Pustaka

Abdusshomad, Muhyiddin. *Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah: Terjemah & Syarh 'Aqidah al 'Awam*. Surabaya: Khalista, 2009

Direktorat Penjaminan Mutu. *Pedoman SPMI Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta: Kemenristekdikti, 2018

Habermas, Jurgen. *The Theory of Communicative Action Volume 2* Translation of Theories des kommunikativen Handelns. Massachusetts: Beacon Press, 1987

Khoiron, "Dalil dan Penjelasan tentang 20 Sifat Wajib Bagi Allah", NU Online, available at <http://www.nu.or.id/post/read/87676/dalil-dan-penjelasan-tentang-20-sifat-wajib-bagi-allah/> posted 24 Maret 2018

Koswara, Deni dan Triatna, Cepi. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010

Nata, Abudin. *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2003

Nizam dan Bassaruddin, T,. (t.t). "Manajemen Pendidikan Tinggi", Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, available pdf version at available at http://luk.staff.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti no. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi

Sallis, Edward. *Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan*. Penterjemah: Ahmad Riyadi dan Fachrurrozi. Yogyakarta: IRCiSoD, 2002

Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Integrity", available online at <http://plato.stanford.edu/entries/integrity>

Sternberg, Robert J. *A Triarchic Approach to Giftedness*. New Heaven Connectitut: Yale University, 1995

Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi, 2003

Whiterington, H. Carl. *Psikologi Pendidikan*, penterjemah: M. Buchori. Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Zuydam, Sabine Van. (t.t) "Credibility as a Source of Political Capital: Exploring Political Leaders' Performance from a Credibility Perspective", paper prepared for the ECPR Joint session 2014, workshop 15: Political Capital and the Dynamic of Leadership: Exploring the Leadership Capital Index. Available pdf at <http://ecpr.eu/filestore/paperproposal/71691ba3-7f4b-4f4a-ae59-3d7551645733.pdf/>

Manajemen Pendidikan Islam sebagai suatu bidang ilmu perlu memiliki paradigma keilmuan yang mapan agar eksistensinya diakui kalangan intelektual dan cendekiawan manajemen pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Spesifikasi bidang ilmu Manajemen Pendidikan Islam sebagai cabang dari ilmu pendidikan Islam *(Islamic Education)*, perlu lebih diperjelas agar secara fungsional ia dapat memberi corak baru dan berkontribusi nyata dalam mengembangkan ilmu manajemen pendidikan. Bidang ilmu Manajemen Pendidikan Islam juga harus mampu menyesuaikan dirinya dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, trend peradaban, dan kebutuhan masyarakat. Revolusi Industri 4.0, misalnya, sebagai perkembangan peradaban modern telah dirasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena *Internet of Things* (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (*Artificial Intelligence*).

Fenomena disrupsi yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi, akan membawa kita pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain. Termasuk dalam hal ini adalah tata kelola kelembagaan pendidikan Islam. Pada konteks inilah paradigma keilmuan Manajemen Pendidikan Islam relevan untuk dikaji dan diskusikan melalui pendekatan riset ilmiah *(scientific research)*.

Sekertariat:
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
E-mail: ppmpi2018@gmail.com

ISBN: 978-602-51969-8-0